

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengacu pada (Menkes, 2012) Nomor 001 Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Fasilitas Pelayanan Kesehatan merupakan tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif ataupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat, dan Pasal 2 yang berisi (1) Pelayanan Kesehatan terdiri dari 3 tingkatan yaitu Pelayanan Kesehatan tingkat Pertama, Pelayanan Kesehatan tingkat Kedua, dan Pelayanan Kesehatan tingkat Ketiga (2) Pelayanan Kesehatan tingkat pertama terdiri dari klinik pratama, tempat praktik perorangan, klinik umum di balai/lembaga pelayanan kesehatan, dan puskesmas.

Berdasarkan (Menkes, 2014) Nomor 75 Pasal 1 ayat (2) pusat kesehatan masyarakat yang disebut puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

Puskesmas wajib menyelenggarakan rekam medis, yang di maksud dengan rekam medis merupakan berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Mengacu pada (Menkes, 2008) Nomor 269 Pasal 1 ayat (2) yang berisi rekam medis harus dibuat secara tertulis, lengkap dan jelas atau secara elektronik, penyelenggaraan rekam rnedis dengan menggunakan teknologi informasi elektronik diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri.

Menurut (Hatta, 2014) dari pelayanan kesehatan di puskesmas yang kemudian dicatat ke dalam rekam medis, terdapat data yang digunakan sebagai fakta dalam pembuatan laporan. Data pelayanan telah selesai dikumpulkan dari unit-unit terkait seperti poliklinik maupun laoratorium kemudian diolah menjadi suatu infromasi. Data yang telah selesai dikumpulkan dapat disediakan menjadi suatu laporan baik tekstual, tabel, maupun grafik. Mengacu pada (Menkes, 2019) Nomor 31 Pasal 3 setiap puskesmas wajib melaksanakan kegiatan sistem informasi

puskesmas baik elektronik maupun non elektronik, paling sedikit mencakup pencatatan dan pelaporan kegiatan puskesmas dan jaringannya, survei lapangan, laporan lintas sector terkait, dan laporan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan wilayah kerjanya.

Berdasarkan (Menkes, 2014) Nomor 75 Pasal 1 ayat (11) menyatakan bahwa Sistem Informasi Puskesmas merupakan suatu sistem yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam mengadakan manajemen puskesmas dalam mencapai sasaran kegiatannya. Menurut (Erawantini & dkk, 2016) Sistem Informasi Manajemen Puskesmas adalah program sistem informasi kesehatan daerah yang memberikan informasi tentang segala keadaan kesehatan masyarakat di tingkat puskesmas mulai dari data diri orang sakit, ketersediaan obat sampai data penyuluhan kesehatan masyarakat. Menurut penelitian (Rizkita, 2019) Simpus yang ada di Puskesmas Mantrijeron belum sepenuhnya mendukung kegiatan laporan SP2TP, sedangkan menurut penelitian (Ningrum, 2015) Simpus belum sepenuhnya mendukung kegiatan pembuatan laporan SP2TP dan hanya optimal penggunaannya untuk pembuatan laporan LB1.

Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) merupakan kegiatan pencatatan dan pelaporan umum terkait sarana, tenaga, dan upaya pelayanan kesehatan di masyarakat yang sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat No.590/BM/DJ/V/96 telah diberlakukan formulir laporan yang ada. Menurut penelitian (Laura, 2018) Pelaksanaan SP2TP di Kota Padang belum optimal, yang disebabkan masih kurangnya tenaga terlatih SP2TP, sarana prasarana serta dana juga masih kurang.

Sistem informasi dapat diukur dengan beberapa model evaluasi yang mudah dikembangkan. Banyak model evaluasi yang dapat digunakan untuk mengukur penerimaan, salah satunya TAM (*Technology Acceptance Model*). TAM adalah sistem informasi yang membuat tentang bagaimana pengguna mau menerima dan menggunakan teknologi. Adapun faktor yang mempengaruhi tentang bagaimana menggunakan sistem tersebut, yaitu: *Ease of Use Perceived* (di mana pengguna percaya bahwa menggunakan sistem ini akan membebaskan dari kesulitan), maksudnya bahwa sistem ini mudah dipergunakan oleh pengguna dan *Usefulness*

Perceived (pengguna percaya bahwa dengan menggunakan sistem ini akan meningkatkan kinerjanya) (Fatmawati, 2015).

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti pada bulan Februari 2020 di Puskesmas Tempel I, penulis mendapatkan informasi bahwa proses pelaksanaan pelaporan SP2TP dengan menggunakan Simpus masih memiliki kelemahan yaitu ada beberapa laporan puskesmas yang belum menggunakan Simpus. Hal ini berdampak pada waktu pengumpulan laporan ke Dinas Kesehatan tidak tepat. Akan tetapi dengan adanya kendala *virus corona (covid-19)* mengakibatkan peneliti tidak dapat melakukan pengambilan data di lahan, sehingga peneliti beralih ke sistem *literature review*. Berdasarkan hal yang telah dipaparkan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “**Tinjauan Aplikasi Simpus Terhadap Pelaporan SP2TP Di Puskesmas**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana aplikasi simpus dalam menunjang pelaksanaan pelaporan SP2TP dengan *Literatur Review*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana simpus dalam menunjang kegiatan pelaporan SP2TP di Puskesmas dengan metode *Literatur Review*.